

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

TAHUN ANGGARAN 2025

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata (138.05.693454)

JALAN RAYA PARUNG KM. 22-23 BOJONGSARI DEPOK

2025

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah umum pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang disajikan diharapkan dapat berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan.

Semoga informasi yang diungkap dan disajikan dalam Laporan Keuangan ini dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait, khususnya aparat pengawas fungsional dan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal.

Depok, 18 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Nana Halim S.E., M.M
NIP. 197312072002121001

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	II
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA.....	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1. DASAR HUKUM	7
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS.....	8
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14
A.4. BASIS AKUNTANSI	14
A.5. DASAR PENGUKURAN	14
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	22
B. 1. BELANJA.....	24
B. 2. BELANJA PEGAWAI	27
B. 3. BELANJA BARANG	28
B. 4. BELANJA MODAL	30
B. 5. CATATAN PENTING LAINNYA.....	31
C. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN NERACA.....	31
C. 1. KAS BENDAHARA PENGELUARAN	31
C. 2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	32
C. 3. PERSEDIAAN	32
C. 4. TANAH	33
C. 5. PERALATAN DAN MESIN	35
C. 6. GEDUNG DAN BANGUNAN	36
C. 7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	36
C. 8. ASET TETAP LAINNYA.....	36
C.10. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	37
C.11 ASET LAIN-LAIN	37
C.12 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA.....	38

C.13	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	38
C.14	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	39
C.15	UANG MUKA DARI KPPN	39
C.16	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	39
C.17	EKUITAS	40
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	40
D. 1.	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	41
D. 2.	BEBAN PEGAWAI	43
D. 3.	BEBAN PERSEDIAAN	46
D. 4.	BEBAN BARANG DAN JASA	46
D. 5.	BEBAN PEMELIHARAAN	48
D. 6.	BEBAN PERJALANAN DINAS	49
D. 7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	49
D. 8.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	50
D. 9.	POS LUAR BIASA	50
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	50
E. 1.	EKUITAS AWAL	51
E. 2.	SURPLUS (DEFISIT) LO	51
E. 3.	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	51
E. 4.	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	51
E. 5.	EKUITAS AKHIR	52
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	52
F. 1.	REKENING PEMERINTAH	52
F. 2.	PENYELESAIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	53
F. 3.	STRUKTUR PEJABAT PERBENDAHARAAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Rincian Output/Laporan Kinerja Satker	14
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 4 Rincian DIPA Awal dan Revisi per Jenis Belanja	22
Tabel 5 Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2025 dan 2024	23
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2025	23
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	24
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025	25
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	26
Tabel 10 Program Prioritas BBPPMPV Bispar TA 2025	26
Tabel 11 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	28
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025	29
Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	30
Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025	30
Tabel 16 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	32
Tabel 17 Rincian Kas lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	32
Tabel 18 Rincian Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	33
Tabel 19 Mutasi Persediaan per 30 Juni 2025	33
Tabel 20 Rincian Tanah per 30 Juni 2025	34
Tabel 21 Mutasi Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025	35
Tabel 22 Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025	36
Tabel 23 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025	37
Tabel 24 Rincian Peralatan dan Mesin yang dihentikan dari Penggunaan	37
Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Aset Tetap per 30 Juni 2025	38
Tabel 26 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025	38
Tabel 27 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025	39
Tabel 28 Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	41
Tabel 29 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	42
Tabel 30 <i>Mapping</i> Realisasi Pendapatan Pada Laporan Operasional	43
Tabel 31 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	44
Tabel 32 Perbedaan Realisasi Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO per 30 Juni 2025	45
Tabel 33 Mutasi Belanja – Beban Pegawai per 30 Juni 2025	45
Tabel 34 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024	46

Tabel 35 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO	47
Tabel 36 Mutasi Belanja - Beban Barang dan Jasa	47
Tabel 37 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024	48
Tabel 38 Perbandingan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO	48
Tabel 39 Rincian Beban Perjalanan per 30 Juni 2025 dan 2024	49
Tabel 40 Perbandingan Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan LO	48
Tabel 41 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024	50
Tabel 42 Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2025 dan 2024	51
Tabel 43 Nilai Transaksi Antar Entitas	52
Tabel 44 Struktur Pejabat Perbendaharaan	53
Tabel 45 Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan	54



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**
Jl. Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 Jawa Barat, Indonesia
Telp. (021) 7431270
E-mail : bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id ;
website : <https://bbppmpvbispar.kemdikbud.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kuasa Pengguna Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 18 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Nana Halim S.E., M.M
NIP.197312072002121001

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.174,557,000.00 atau mencapai 13,43% persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp.1,300,000,000.00 .

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.26,092,393,501.00 atau mencapai 29,80% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.87,571,238,000.00 .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.383,707,127,877.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.385,255,698.00 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.383.321,872,179.00 ; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.00 .

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1,426,713,945.00 dan Rp.382,280,413,932.00 .

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.183,642,333.00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.32,260,765,624.00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.32,077,123,291.00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 32,077,123,291.00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp0.00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.32,077,123,291.00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.414,357,537,223.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.382,280,413,932.00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.300.000.000	174.557.000	13,43	-	-	-
Jumlah Pendapatan		1.300.000.000	174.557.000	13,43	-	-	-
BELANJA	B.2.						
Belanja Pegawai	B.3	24.335.637.000	13.299.477.399	54,65	-	-	-
Belanja Barang	B.4	58.943.881.000	12.792.916.102	21,70	-	-	-
Belanja Modal	B.5	4.291.720.000	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		87.571.238.000	26.092.393.501	29,80	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	30 Juni 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
ASET					
Aset Lancar					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	300.000.000	-	300.000.000	100,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	84.571.898	-	84.571.898	100,00
Persediaan	C.3	683.800	-	683.800	100,00
Jumlah Aset Lancar		385.255.698	-	385.255.698	100,00
Aset Tetap					
Tanah	C.4	292.365.680.000	-	292.365.680.000	100,00
Peralatan dan Mesin	C.5	85.197.428.743	-	85.197.428.743	100,00
Gedung dan Bangunan	C.6	104.915.168.936	-	104.915.168.936	100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	17.807.401.064	-	17.807.401.064	100,00
Aset Tetap Lainnya	C.8	158.915.965	-	158.915.965	100,00
Akumulasi Penyusutan	C.9	(117.122.722.529)	-	(117.122.722.529)	100,00
Jumlah Aset Tetap		383.321.872.179	-	383.321.872.179	100,00
Aset Lainnya					
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		-	-	(466.147.106)	(100,00)
Aset Lain-lain	C.10	161.215.000	-	161.215.000	100,00
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(161.215.000)	-	(161.215.000)	100,00
Jumlah Aset Lainnya		-	-	-	0,00
JUMLAH ASET		383.707.127.877	-	383.707.127.877	100,00
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	1.022.457.163	-	1.022.457.163	100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.13	19.684.884	-	19.684.884	100,00
Uang Muka dari KPPN	C.14	300.000.000	-	300.000.000	100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.15	84.571.898	-	84.571.898	100,00
Jumlah Kewajiban		1.426.713.945	-	1.426.713.945	100,00
EKUITAS					
Ekuitas	C.16	382.280.413.932	-	382.280.413.932	100,00
Jumlah Ekuitas		382.280.413.932	-	382.280.413.932	100,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		383.707.127.877	-	383.707.127.877	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Operasional					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak		183.642.333	-	183.642.333	100,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		183.642.333	-	183.642.333	100,00
Jumlah Pendapatan Operasional		183.642.333	-	183.642.333	100,00
Beban Operasional					
Beban Pegawai	D.2	14.173.947.037	-	14.173.947.037	100,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	4.414.479.347	-	4.414.479.347	100,00
Beban Pemeliharaan	D.4	3.684.674.215	-	3.684.674.215	100,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	4.675.326.000	-	4.675.326.000	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	5.312.339.025	-	5.312.339.025	100,00
Jumlah Beban Operasional		32.260.765.624	-	32.260.765.624	100,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.7				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	0.00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	0.00
Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	0.00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00
POS LUAR BIASA	D.8				
Beban Luar Biasa		-	-	-	0.00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		-	-	-	0.00
Surplus/Defisit - LO		(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
Ekuitas Awal	E.1	-	-	-	0,00
Surplus/Defisit - LO	E.2	(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	-	-	-	-
Penyesuaian Nilai Aset					
Koreksi Nilai Persediaan					
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	-	-	-	-
Lain-Lain	E.3.4	-	-	-	-
Transaksi Antar Entitas	E.4	414.357.537.223	-	414.357.537.223	100,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		382.280.413.932	-	382.280.413.932	100,00
Ekuitas Akhir	E.5	382.280.413.932	-	382.280.413.932	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A. 1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27/M/2025 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.61/PB/2009 tentang Penyelesaian kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
23. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
24. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 4 Juli 2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2025;
25. Surat Sesjen Kemendikdasmen Nomor :14197/A.A2/K.U03.02/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Langkah-langkah dan Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikdasmen Semester I Tahun 2025.

A. 2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya (Permendikbud No: 26/2020 pasal 12).

Berdasarkan **Permendikbud No.26 tahun 2020**, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya (Pasal 12).

Untuk melaksanakan tugas dimaksud PPPPTK memiliki fungsi :

- a. Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- b. Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
- c. Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
- e. Pengelolaan data dan informasi;
- f. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- g. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan Pelaksanaan urusan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dengan memperhatikan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 serta tugas dan fungsi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

"Menjadi Pusat Keunggulan Pendidikan Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata yang Berkarakter Pancasila dan Bertaraf Internasional"

Visi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tersebut mengandung makna dan cerminan sebagai berikut:

a. Pusat Keunggulan.

Pusat Keunggulan (Center of Excellence) mengandung makna dan mencerminkan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah lembaga yang memiliki keunggulan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga secara kreatif dan inovatif bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Keunggulan dimaksud dapat dijadikan inspirasi dan rujukan bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan SMK Bisnis dan Pariwisata;

b. Pendidikan Kejuruan yang Berkarakter.

Pendidikan Kejuruan yang berkarakter mengandung makna dan mencerminkan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendorong, memotivasi, dan menginspirasi SMK Bisnis dan Pariwisata (termasuk Kesehatan dan Pekerjaan Sosial) untuk memahami pluralitas sosial dan keberagaman budaya, membentuk wawasan kebangsaan, budaya riset, inovasi, budaya produksi, tangguh melestarikan warisan budaya, apresiasi terhadap keragaman seni, dan berkembangnya promosi dan diplomasi budaya;

c. Bertaraf Internasional.

Bertaraf internasional mengandung makna dan mencerminkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengacu dan berpegang pada ketentuan-ketentuan patokan baku ISO yang berlaku secara internasional, serta trend atau kecenderungan yang berkembang secara internasional. Think Globally and Act Locally.

2. Misi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan vokasi di bidang Bisnis dan Pariwisata melalui pembinaan, bimbingan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi;
- b. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di bidang Bisnis dan Pariwisata, serta Entrepreneurship;
- c. Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi di bidang Bisnis dan Pariwisata;
- d. Melaksanakan Teaching Factory untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan industri;

- e. Berperan aktif dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang Bisnis dan Pariwisata.

3. Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Sesuai dengan Permendikbud No. 26 Tahun 2020 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata terdiri dari seorang Kepala, seorang Kabag Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata(Permendikbud Nomor: 26 Tahun 2020)

Untuk kepentingan operasional Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata, mengembangkan organisasi secara internal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin luas.

4. Capaian Output Kegiatan

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata terdapat 2 jenis kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Pendidikan Vokasi. Indikator Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi OMSPAN per 30 Juni 2025 dan progres persentase pencapaian output pada satker BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dapat dilihat pada rincian Output Kegiatan berikut ini ;

Tabel 1
Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN Per 30 Juni 2025
Laporan Kinerja Per Satuan Kerja

Periode s.d bulan : 2025-06
Kementerian Negara/Lembaga : 138 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Eselon 1 : 138.05 - DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Wilayah/Provinsi : 01.54 - KOTA JAKARTA SELATAN/DKI JAKARTA
Satuan Kerja : 693454 - BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 07-07-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
10	PENDIDIKAN	87.571.238.000,00	26.092.579.060,00	29,8%							
90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	87.571.238.000,00	26.092.579.060,00	29,8%							
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	43.132.617.000,00	5.834.205.800,00	13,53%							
7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	43.132.617.000,00	5.834.205.800,00	13,53%							
PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	252.773.000,00	0,00	0%							
001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	252.773.000,00	0,00	0%	2	Rekomendasi Kebijakan	0,0000	15%	15%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Satker masih berupaya melakukan koordinasi dengan pusat dan balai lain terkait konsep inovasi model pembelajaran Tahun 2025.
PEC	Kerja sama	490.459.000,00	0,00	0%							
001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	490.459.000,00	0,00	0%	16	Kesepakatan	0,0000	6%	6%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Satker melakukan koordinasi dengan sekolah dan industri terkait program kerjasama yang bisa disinergikan bersama.
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan	4.903.076.000,00	0,00	0%							
001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	4.903.076.000,00	0,00	0%	733	Lembaga	0,0000	6%	6%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Tim penjaminan mutu di satker sedang melakukan pembuatan konsep penjaminan mutu serta menitikberatkan hal yang menjadi kualitas output dalam kegiatan ini.
RAA	Sarana Bidang Pendidikan	4.291.720.000,00	0,00	0%							
001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BBPPMPV)	4.291.720.000,00	0,00	0%	1	Paket	0,0000	39%	39%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	daya serap anggaran belum bisa maksimal karena menunggu proses likuidasi dari kemenristek (kode 032) ke Kemendikdasmen (kode 138) maka segala transaksi menggunakan Sakti dan SIMAN di pending sampai proses likuidasi selesai.

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	33.194.589.000,00	5.834.205.800,00	17,58%							
001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselarsakan dengan kebutuhan dunia kerja	4.041.858.000,00	0,00	0%	809,0000	Orang	0,0000	6%	6%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Saat ini satker masih dalam proses pembuatan konsep pelaksanaan kegiatan
002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	28.495.522.000,00	5.616.359.800,00	19,71%	1.518,0000	Orang	548,0000	41%	21,29%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Pelatihan Guru Umum : 66 orang terbagi menjadi 3 kelas (IPAS, MTK, dan Bhs Inggris) selama 7 hari (luring) . Kegiatan dimulai tanggal 15 sd 21 Juni 2025. Dari segi anggaran : pertanggungjawaban masih dalam proses karena kegiatan baru berakhir di akhir juni. Selain itu juga terdapat blokir perjadiin sebesar 50% sehingga anggaran tidak bisa terserap secara maksimal. untuk target PNBP : sudah ada total peserta diklat sebanyak 300
004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	657.209.000,00	217.846.000,00	33,15%	39,0000	Orang	39,0000	100%	66,85%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	LKP 39 orang : bidang keahlian Sekretaris (19 orang) dan Kecantikan (20 orang) selama 7 hari luring . Pelaksanaan di tanggal 15 sd 21 Juni. Dari segi anggaran : Pertanggungjawaban masih dalam proses karena kegiatan berakhir di akhir juni. Selain itu, terdapat blokir perjadiin sebesar 50% sehingga anggaran tidak bisa
WA	Program Dukungan Manajemen	44.438.621.000,00	20.258.373.260,00	45,59%							
7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	44.438.621.000,00	20.258.373.260,00	45,59%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	44.438.621.000,00	20.258.373.260,00	45,59%							
956	Layanan BMN	40.000.000,00	10.000.000,00	25%	4,0000	Layanan	2,0000	50%	25%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	laporan wasdal semester 1 sudah selesai. Tinggal menunggu surat edaran dari eselon 1 mengenai teknis unggah dokumennya. untuk pengelolaan BMN : sudah selesainya Penetapan status penggunaan (PSP) Untuk target
962	Layanan Umum	2.575.880.000,00	322.550.000,00	12,52%	1,0000	Layanan	0,0000	49,98%	37,46%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	kegiatan tetap berjalan dengan mengedepankan efisiensi anggaran. Adapun penarikan dari sisi anggaran yang belum maksimal dikarenakan adanya blokir perjadiin
994	Layanan Perkantoran	41.822.741.000,00	19.925.823.260,00	47,64%	1,0000	Layanan	0,0000	49,98%	2,34%	00	kegiatan tetap berjalan dengan mengedepankan efisiensi anggaran. Adapun penarikan dari sisi anggaran yang belum maksimal dikarenakan adanya blokir perjadiin

A. 3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A. 4. BASIS AKUNTANSI

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Ditjen Vokasi yang merupakan entitas pelaporan dari BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan dari BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membantuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, Dimana sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - d) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Nilai Aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- e) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah salah satu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan sampai dengan 30 Juni 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 5 (lima) kali dari DIPA awal dengan total pagu anggaran tetap (tidak berubah). Adapun revisi disebabkan oleh adanya Pemutakhiran Data POK (hanya terjadi penggeseran pada beberapa komponen nilai dalam KRO namun tidak menggeser total dari masing-masing KRO), Revisi Halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana) dan Blokir Automatic Adjustment Ditjen Pendidikan Vokasi pada Belanja Barang.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian DIPA Awal dan Revisi per Jenis Belanja

Uraian	2025			
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Tambah (Kurang)	%
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.300.000.000	1.300.000.000	-	13,43
Jumlah Pendapatan	1.300.000.000	1.300.000.000	-	13,43
Belanja				
Belanja Pegawai	24.335.637.000	24.335.637.000	-	-
Belanja Barang	58.943.881.000	58.943.881.000	-	-
Belanja Modal	4.291.720.000	4.291.720.000	-	-
Jumlah Belanja	87.571.238.000	87.571.238.000	-	-

Penjelasan secara rinci atas perubahan atau revisi pagu di atas terdapat pada Catatan Penting Lainnya. Perbandingan pagu tahun anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	%
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.300.000.000	-	1.300.000.000	100,00
Jumlah Pendapatan	1.300.000.000	0	1.300.000.000	100,00
Belanja				
Belanja Pegawai	24.335.637.000	-	24.335.637.000	100,00
Belanja Barang	58.943.881.000	-	58.943.881.000	100,00
Belanja Modal	4.291.720.000	-	4.291.720.000	100,00
Jumlah Belanja	87.571.238.000	-	87.571.238.000	100,00

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan kode satker 693454 merupakan satker baru dan baru memiliki DIPA pada Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini, tidak dilakukan perbandingan pagu dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya baik pagu pendapatan maupun pagu belanja karena tidak mempunyai pembanding (Nol).

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp174,557,000.00 atau mencapai 13,43% dari estimasi pendapatan sebesar Rp.1,300,000,000.00. Pendapatan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian estimasi pendapatan dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2025

Akun		Anggaran	Realisasi	Sisa/Pencapaian	
				Nilai	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	300.000.000	174.557.000	125.443.000	58,19
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	300.000.000	174.557.000	125.443.000	58,19
4252	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
4259	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
Jumlah		1.300.000.000	174.557.000	1.125.443.000	13,43

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2025 sebesar Rp.174,557,000.00 hanya berasal dari **Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha** sebesar Rp.174,557,000.00 yaitu pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan oleh pihak ketiga/masyarakat umum/instansi lain untuk kegiatan/acara pernikahan, kegiatan wisuda, sosialisasi, dll sebesar

Rp174,557,000.00, sedang penerimaan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan dari estimasi pendapatan sebesar Rp.1.000.000.000,- belum ada realisasi karena masih dalam tahap pengajuan MP PNB

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Akun	Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	174.557.000	-	174.557.000	100,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	174.557.000	-	174.557.000	100,00
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	-	-	0.00
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-	-	0.00
4259	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	0.00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0.00
	Jumlah	174.557.000	0	174.557.000	100,00

Pada tabel realisasi pendapatan diatas terdapat kenaikan pendapatan sebesar 174,557,000,- atau sebesar 100,00% karena BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan kode satker 693454 merupakan satker baru dan baru memiliki DIPA pada Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini, tidak dilakukan perbandingan Realisasi Pendapatan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya karena tidak mempunyai pembanding (Nol).

B. 1. BELANJA

Realisasi Belanja Bruto BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.26,092,712,760.00 dan dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp.319,259.00 sehingga realisasi Belanja Netto adalah Rp.26,092,393,501.00 atau 29.80% persen dari anggaran belanja sebesar Rp.87,571,238,000.00 . Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

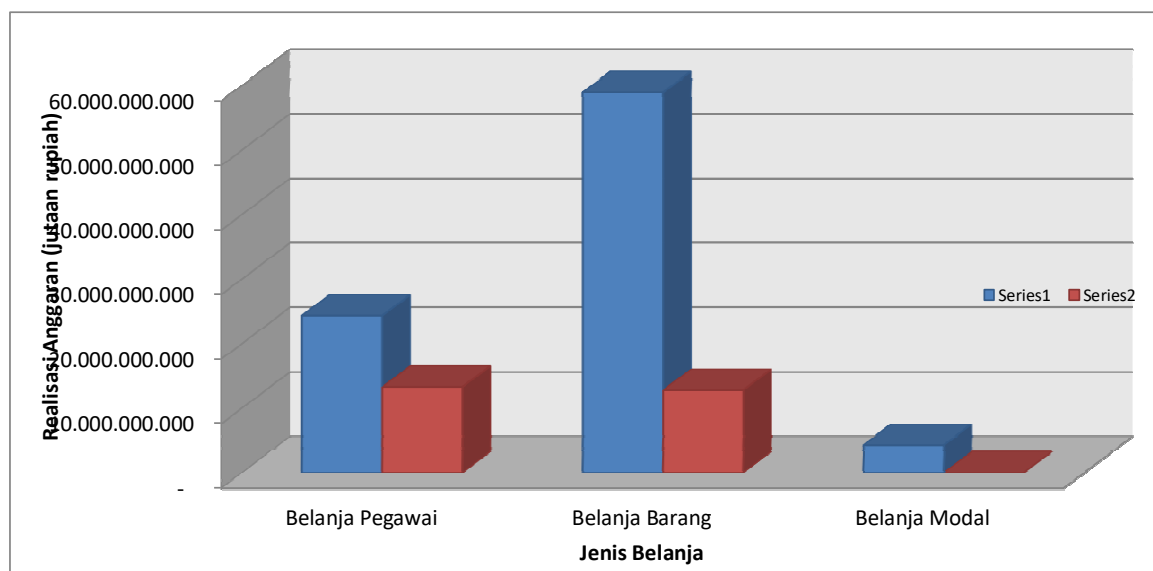
Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025

Akun	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa/Pencapaian	
				Nilai	%
51	Belanja Pegawai	24.335.637.000	13.299.477.399	11.036.159.601	54,65
52	Belanja Barang	58.943.881.000	12.792.916.102	46.150.964.898	21,70
53	Belanja Modal	4.291.720.000	0	4.291.720.000	-
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	-
	Total Belanja Bruto	87.571.238.000	26.092.393.501	61.478.844.499	29,80
	Pengembalian Belanja	0	319.259	(319.259)	-
	Belanja Netto	87.571.238.000	26.092.074.242	61.479.163.758	29,80

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

(dalam jutaan rupiah)

Grafik 1 :
Komposisi Anggaran dan Belanja per 30 Juni 2025



Perbandingan realisasi seluruh belanja per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Akun	Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
51	Belanja Pegawai	13.299.477.399	0	13.299.477.399	100,00
52	Belanja Barang	12.792.916.102	0	12.792.916.102	100,00
53	Belanja Modal	0	0	0	0.00
	Jumlah Belanja	26.092.393.501	0	26.092.393.501	100,00
	Pengembalian Belanja	319.259	-	319.259	-
	Belanja Netto	26.092.074.242	0	26.092.074.242	100,00

Penjelasan secara rinci atas tabel di atas akan disajikan pada masing-masing pos belanja.

PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025 PADA BBPPMPV BISPAR :

Tabel 10

Program Prioritas BBPPMPV Bispar TA 2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	252.773.000,00	0,00	0%					
001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	252.773.000,00	0,00	0%	2	Rekomendasi Kebijakan	0,0000	15%	Satker masih berupaya melakukan koordinasi dengan pusat dan balai lain terkait konsep inovasi model pembelajaran Tahun 2025.
PEC	Kerja sama	490.459.000,00	0,00	0%					
001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	490.459.000,00	0,00	0%	16	Kesepakatan	0,0000	6%	Satker melakukan koordinasi dengan sekolah dan industri terkait program kerjasama yang bisa disinergikan bersama.
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan	4.903.076.000,00	0,00	0%					
001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	4.903.076.000,00	0,00	0%	733	Lembaga	0,0000	6%	Tim penjaminan mutu di satker sedang melakukan pembuatan konsep penjaminan mutu serta menitikberatkan hal yang menjadi kualitas output dalam kegiatan ini.
RAA	Sarana Bidang Pendidikan	4.291.720.000,00	0,00	0%					
001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	4.291.720.000,00	0,00	0%	1	Paket	0,0000	39%	daya serap anggaran belum bisa maksimal karena menunggu proses likuidasi dari kemenristek (kode 032) ke Kemendikdasmen (kode 138) maka segala transaksi menggunakan Sakti dan SIMAN di pending sampai proses likuidasi selesai.
SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	33.194.589.000,00	5.834.205.800,00	17,58%					
001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	4.041.858.000,00	0,00	0%	809	Orang	0,0000	6%	Saat ini satker masih dalam proses pembuatan konsep pelaksanaan kegiatan
002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	28.495.522.000,00	5.616.359.800,00	19,71%	1.518	Orang	548,0000	41%	Pelatihan Guru Umum : 66 orang terbagi menjadi 3 kelas (IPAS, MTK, dan Bhs Inggris) selama 7 hari (luring) . Kegiatan dimulai tanggal 15 sd 21 Juni 2025. Dari segi anggaran : pertanggungjawaban masih dalam proses karena kegiatan baru berakhir di akhir juni. Selain itu juga terdapat blokir perjalan sebesar 50% sehingga anggaran tidak bisa terserap secara maksimal. untuk target PNBP : sudah ada total peserta diklat sebanyak 300 orang.
004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	657.209.000,00	217.846.000,00	33,15%	39	Orang	39,0000	100%	LKP 39 orang : bidang keahlian Sekretaris (19 orang) dan Kecantikan (20 orang) selama 7 hari luring . Pelaksanaan di tanggal 15 sd 21 Juni. Dari segi anggaran : Pertanggungjawaban masih dalam proses karena kegiatan berakhir di akhir juni. Selain itu, terdapat blokir perjalan sebesar 50% sehingga anggaran tidak bisa terserap secara maksimal.

B. 2. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah sebesar **Rp.13,299,477,399.00** atau **54,65%** (*netto*) dari pagu belanja pegawai sebesar **Rp.24,335,637,000.00**. Untuk rincian realisasi belanja pegawai dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa/Pencapaian	
				Nilai	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13.516.562.000	7.188.167.997	6.328.394.003	53,18
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9.775.842.000	5.258.932.000	4.516.910.000	53,80
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	106.000	65.247	40.753	61,55
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	703.532.000	395.564.450	307.967.550	56,23
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	199.932.000	111.693.494	88.238.506	55,87
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40.045.000	19.990.000	20.055.000	49,92
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	896.443.000	493.802.000	402.641.000	55,08
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	127.406.000	108.613.566	18.792.434	85,25
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	457.074.000	255.063.240	202.010.760	55,80
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.044.006.000	403.164.000	640.842.000	38,62
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	272.176.000	141.280.000	130.896.000	51,91
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	288.508.000	176.516.004	111.991.996	61,18
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	185.650.000	122.571.296	63.078.704	66,02
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000	2.094	906	69,80
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	18.509.000	7.455.761	11.053.239	40,28
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.706.000	2.010.545	1.695.455	54,25
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30.240.000	23.908.998	6.331.002	79,06
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.800.000	6.433.310	10.366.690	38,29
511628	Belanja Uang Makan PPPK	33.600.000	14.134.000	19.466.000	42,07
5122	Belanja Lembur	500.000.000	34.182.000	465.818.000	6,84
512211	Belanja Uang Lembur	500.000.000	34.182.000	465.818.000	6,84
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	10.030.567.000	5.900.930.657	4.023.824.629	58,83
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	9.773.000.000	5.749.175.371	4.023.824.629	58,83
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	257.567.000	151.755.286	105.811.714	58,92
Realisasi Belanja Bruto		24.335.637.000	13.299.796.658	10.818.036.632	54,65
Pengembalian Belanja Gaji Pokok		-	319.259	(319.259)	-
Realisasi Belanja Netto		24.335.637.000	13.299.477.399	11.036.159.601	54,65

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp13,299,477,399.00** dan **Rp0.00** atau mengalami **kenaikan** sebesar **100,00%**. Hal ini karena BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan kode satker 693454 merupakan satker baru dan baru memiliki DIPA pada Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak mempunyai pembanding (Nol).

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Akun	Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.029.325.717	-	8.029.325.717	100,00
511111	Beban Gaji Pokok PNS	5.880.717.500	-	5.880.717.500	100,00
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	72.396	-	72.396	100,00
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	441.854.360	-	441.854.360	100,00
511122	Beban Tunj. Anak PNS	125.001.492	-	125.001.492	100,00
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20.970.000	-	20.970.000	100,00
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	554.715.000	-	554.715.000	100,00
511125	Beban Tunj. PPh PNS	111.148.319	-	111.148.319	100,00
511126	Beban Tunj. Beras PNS	285.334.800	-	285.334.800	100,00
511129	Beban Uang Makan PNS	452.521.900	-	452.521.900	100,00
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	156.989.950	-	156.989.950	100,00
5116	Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	198.474.088	-	198.474.088	100,00
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	139.136.996	-	139.136.996	100,00
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.362	-	2.362	100,00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.458.061	-	8.458.061	100,00
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2.283.321	-	2.283.321	100,00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	27.156.998	-	27.156.998	100,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7.302.350	-	7.302.350	100,00
511628	Beban Uang Makan PPPK	14.134.000	-	14.134.000	100,00
5122	Beban Lembur	34.182.000	-	34.182.000	100,00
512211	Beban Uang Lembur	34.182.000	-	34.182.000	100,00
5124	Beban Tunj. Khusus & Beban Pe	5.911.965.232	-	-	100,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.760.209.946	0	-	100,00
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	151.755.286	-	-	100,00
Realisasi Belanja Bruto		14.173.947.037	0	14.173.947.037	100,00

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam penyerapan anggaran belanja pegawai karena belanja Gaji Induk, Tunjangan Kinerja Ke-13 dan Tunjangan Kinerja ke-14, Tunjangan uang Makan, Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 dapat dibayarkan dengan tepat waktu. Pada Tahun 2025 sampai dengan 30 Juni, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menyalurkan tunjangan kinerja ke 156 (Seratus Lima Puluh Enam) orang PNS dengan rincian sebagai berikut : Struktural 2 orang, Fungsional Umum 87 orang, Fungsional Tertentu WI 49 orang, Dokter 1 org, PTP 8 orang dan Fungsional Tertentu Penyetaraan 9 orang. Adapun yang pensiun sampai dengan 30 Juni 2025 sebanyak 12 (dua belas) orang.

B. 3. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah sebesar **Rp.12,792,916,102.00** atau **21,70% (netto)** dari pagu anggaran belanja barang sebesar **Rp.58,943,881,000.00**. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa/Pencapaian	
				Nilai	%
5211	Belanja Barang Operasional	4.586.882.000	1.415.903.175	3.170.978.825	30,87
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3.675.526.000	1.200.084.175	2.475.441.825	32,65
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	200.482.000	55.089.000	145.393.000	27,48
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	45.000.000	-	45.000.000	-
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	580.920.000	160.730.000	420.190.000	27,67
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	84.954.000	-	84.954.000	-
5212	Belanja Barang Non Operasional	6.234.228.000	1.106.127.000	5.128.101.000	17,74
521211	Belanja Bahan	4.956.678.000	816.977.000	4.139.701.000	16,48
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	100.100.000	40.150.000	59.950.000	40,11
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.177.450.000	249.000.000	928.450.000	21,15
5218	Belanja Barang Persediaan	141.479.000	-	141.479.000	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	123.479.000	-	123.479.000	-
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	18.000.000	-	18.000.000	-
5221	Belanja Jasa	6.824.250.000	2.056.765.712	4.767.484.288	30,14
522111	Belanja Langganan Listrik	2.520.000.000	1.127.392.912	1.392.607.088	44,74
522112	Belanja Langganan Telepon	42.000.000	-	42.000.000	-
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	-	-	-
522.141	Belanja Sewa	188.600.000	111.372.800	77.227.200	59,05
522151	Belanja Jasa Profesi	3.140.350.000	324.500.000	2.815.850.000	10,33
522191	Belanja Jasa Lainnya	933.300.000	493.500.000	439.800.000	52,88
5231	Belanja Pemeliharaan	8.804.743.000	3.538.794.215	5.265.948.785	40,19
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.340.863.000	3.305.822.765	4.035.040.235	45,03
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.463.880.000	232.971.450	1.230.908.550	15,91
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	32.352.299.000	4.675.326.000	27.676.973.000	14,45
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.589.144.000	754.270.000	7.834.874.000	8,78
524113	Belanja Perjalanan Dalam Kota	17.640.000	-	17.640.000	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.250.000	-	38.250.000	-
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.707.265.000	3.921.056.000	19.786.209.000	16,54
Realisasi Belanja Bruto		58.943.881.000	12.792.916.102	46.150.964.898	21,70
Pengembalian Belanja		-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto		58.943.881.000	12.792.916.102	46.150.964.898	21,70

Perbandingan realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp12,792,916,102.00** dan **Rp0.00** atau mengalami **kenaikan** sebesar **100,00%**. Hal ini karena BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan kode satker 693454 merupakan satker baru dan baru memiliki DIPA pada Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak mempunyai pembanding (NoI).

Tabel 14
Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

5211	Belanja Barang Operasional	1.415.903.175	0	1.415.903.175	100,00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.200.084.175	-	1.200.084.175	100,00
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	55.089.000	-	55.089.000	100,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	160.730.000	-	160.730.000	100,00
5212	Belanja Barang Non	1.106.127.000	0	1.106.127.000	100,00
521211	Belanja Bahan	816.977.000	-	816.977.000	100,00
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	40.150.000	-	40.150.000	100,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	249.000.000	-	249.000.000	100,00
5218	Belanja Barang Persediaan	0	0	-	0,00
5221	Belanja Jasa	2.056.765.712	0	2.056.765.712	100,00
522111	Belanja Langganan Listrik	1.127.392.912	-	1.127.392.912	100,00
522141	Belanja Sewa	111.372.800	-	111.372.800	100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	324.500.000	-	324.500.000	100,00
522192	Belanja Jasa Lainnya	493.500.000	-	493.500.000	100,00
5231	Belanja Pemeliharaan	3.538.794.215	0	3.538.794.215	100,00
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.305.822.765	-	3.305.822.765	100,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232.971.450	-	232.971.450	100,00
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.675.326.000	0	4.675.326.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	754.270.000	-	754.270.000	100,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.921.056.000	-	3.921.056.000	100,00
Realisasi Belanja Bruto		12.792.916.102	0	12.792.916.102	100,00
Pengembalian Belanja		-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto		12.792.916.102	-	12.792.916.102	100,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025

B. 4. BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah sebesar **Rp.0.00** dari pagu anggaran belanja modal sebesar **Rp.4,291,720,000.00** Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025

Akun	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa/Pencapaian	
				Nilai	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.291.720.000	0	4.291.720.000	-
	Total Belanja Bruto	4.291.720.000	0	4.291.720.000	-
	Pengembalian Belanja	0	-	-	-
	Belanja Netto	4.291.720.000	0	4.291.720.000	-

Sampai dengan periode 30 Juni 2025 belum ada realisasi belanja modal disebabkan masih menunggu proses likuidasi satker lama selesai yaitu pada bulan Juni 2025 sesuai dengan BAST No. : 11826/A.A2/KU.03.02/2025

B. 5. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pada tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki DIPA dengan dokumen nomor : SP DIPA-138.05.2.693454/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu sebesar **Rp.87,571,238,000.00**. Adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut :
 - Revisi I tanggal 06 Februari 2025 dengan besaran pagu tetap (tidak berubah) yaitu sebesar **Rp.87,571,238,000.00**. Adapun revisi merupakan usulan pagu alokasi.
 - Revisi 2 tanggal 22 Februari 2025 dengan besaran pagu tetap (tidak berubah) yaitu sebesar **Rp. 87,571,238,000.00**. Adapun revisi merupakan Revisi Efisiensi Anggaran.
 - Revisi 3 tanggal 15 April 2025 dengan besaran pagu tetap (tidak berubah) yaitu sebesar **Rp.87,571,238.00**. Revisi merupakan revisi Hal III DIPA Triwulan 2
 - Revisi 4 tanggal 22 Mei 2025 dengan besaran pagu tetap (tidak berubah) yaitu sebesar **Rp.87,571,238.00**. Revisi Merupakan Revisi Buka Blokir Efisiensi.
 - Revisi 5 tanggal 05 Juni 2025 dengan besaran pagu tetap (tidak berubah) yaitu sebesar **Rp.87,571,238.00**. Adapun revisi disebabkan karena adanya pemutakhiran KPA.
 - Revisi 6 tanggal 14 Juli 2025 dengan besaran pagu tetap (tidak berubah) yaitu sebesar **Rp.87,571,238.00**. Revisi merupakan revisi Hal. III DIPA Tri Wulan 3.

C. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN NERACA

C. 1. KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp300,000,000.00** dan **Rp0.00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	
				Nilai	%
1	Uang di Rekening	-	-	-	0.00
2	Uang Tunai	300.000.000	-	300.000.000	100,00
3	Kuitansi UP/TUP	-	-	-	0.00
4	Uang di BPP	-	-	-	0.00
Jumlah		300.000.000	-	300.000.000	100

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 merupakan Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan dan akan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun.

C. 2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan setara kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing **Rp.84,571,898.00** dan **Rp0.00**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening bank maupun uang tunai. Rincian sumber kas lainnya dan setara kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Kas lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	
				Nilai	%
1	LS Bendahara Pengeluaran (Perjadin)	-	0	-	0.00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya (Pajak Bendahara Pengeluaran)	84.571.898	0	84.571.898	100,00
Jumlah		84.571.898	0	84.571.898	100

Saldo kas lainnya dan setara kas per 30 Juni 2025 merupakan Utang jangka pendek lainnya (Pajak Bendahara Pengeluaran) yang belum disetor sebesar **Rp.84,571,898.00**. Utang pajak Bendahara Pengeluaran merupakan pungutan pajak atas uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas Negara per 30 Juni 2025 sebagaimana dokumen terlampir (Rekening Koran dan LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2025).

C. 3. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk

dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.683,000.00** dan **Rp.0.00**.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 18
Rincian Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Barang Konsumsi	683.800	0	683.800	100,00
	Jumlah	683.800	0	683.800	100,00

Semua barang persediaan berada dalam kondisi baik. Mutasi nilai persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 19
Mutasi Persediaan per 30 Juni 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	683.800
Pembelian Barang Konsumsi	683.800
Pembelian Persediaan Materai	0
Pendetailan Persediaan berdasarkan BAST	0
Mutasi kurang:	0
Pemakaian Barang Konsumsi	0
Pemakaian Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0
Penyerahan Kepada Masyarakat	0
Saldo per 30 Juni 2025	683.800

Sampai dengan 30 Juni 2025 mutasi tambah atas persediaan yaitu :

- Belanja Barang Persediaan Konsumsi sebesar **Rp.683,000.00**

C. 4. TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah tetap yaitu sebesar **Rp292,365,680,000.00** karena tidak ada mutasi nilai Tanah sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Tanah per 30 Juni 2025

No		Uraian Tanah	
1.	Lokasi Luas Tanah Jenis Legalitas/Surat Nomor Tanggal Atas Nama Nilai Keterangan	:	Bojongsari 57.386 m ² Sertifikat hak pakai 5 7 Agustus 1986 Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp144.332.964.000 Sudah Bersertifikat
2.	Lokasi Luas Tanah Jenis Legalitas/Surat Nomor Tanggal Atas Nama Nilai Keterangan	:	Bojongsari 50.625 m ² Sertifikat hak pakai 1 7 Agustus 1986 Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp127,328,204,000 Sudah Bersertifikat
3.	Lokasi Luas Tanah Jenis Legalitas/Surat Nomor Tanggal Atas Nama Nilai Keterangan	:	Bojongsari 722 m ² Sertifikat hak pakai BN 734931 24 April 2014 Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.815.921,000 Sudah Bersertifikat
4.	Lokasi Luas Tanah Jenis Legalitas/Surat Nomor Tanggal Atas Nama Nilai Keterangan	:	Bojongsari 494 m ² Sertifikat hak pakai BN 734932 24 April 2014 Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.242.472,000 Sudah Bersertifikat
5.	Lokasi Luas Tanah Jenis Legalitas/Surat Nomor Tanggal Atas Nama Nilai Keterangan	:	Bojongsari 576 m ² Sertifikat hak pakai BN 734933 24 April 2014 Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.448.712,000 Sudah Bersertifikat
6.	Lokasi	:	Bojongsari

No	Uraian Tanah		
	Luas Tanah	:	4.876 m ²
	Jenis	:	Sertifikat hak pakai
	Legalitas/Surat	:	BN 734934
	Nomor	:	24 April 2014
	Tanggal	:	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan
	Atas Nama	:	Kebudayaan Rp12.241.114,000
	Nilai	:	Sudah Bersertifikat
	Keterangan	:	
7.	Lokasi	:	Bojongsari
	Luas Tanah	:	771 m ²
	Jenis	:	Sertifikat hak pakai
	Legalitas/Surat	:	BN 734935
	Nomor	:	24 April 2014
	Tanggal	:	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan
	Atas Nama	:	Kebudayaan
	Nilai	:	Rp1.939.162,000
	Keterangan	:	Sudah Bersertifikat
8.	Lokasi	:	Bojongsari
	Luas Tanah	:	802 m ²
	Jenis	:	Sertifikat hak pakai
	Legalitas/Surat	:	BN 734936
	Nomor	:	24 April 2014
	Tanggal	:	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan
	Atas Nama	:	Kebudayaan
	Nilai	:	Rp2.017.131,000
	Keterangan	:	Sudah Bersertifikat

C. 5. PERALATAN DAN MESIN

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.85,197,428,743.00** dan **Rp.0.00** Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 21
Mutasi Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	85.197.428.743
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Penyelesaian pembangunan KDP	0
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0
Saldo per 30 Juni 2025	85.197.428.743
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	64.676.579.500
Nilai buku per 30 Juni 2025	20.520.849.243

Transaksi/Mutasi Peralatan dan Mesin hanya terdapat pada mutase tambah yaitu transfer masuk dari satker likuidasi sesuai dengan BAST No. 11826/A.A2/KU.03.02/2025 sebesar **Rp.85,197,428,743.00**.

C. 6. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.104,915,168,936.00** dan **Rp.0.00**.

Transaksi/Mutasi Gedung dan Bangunan hanya terdapat pada mutasi tambah yaitu transfer masuk dari satker likuidasi sesuai dengan BAST No. 11826/A.A2/KU.03.02/2025 sebesar **Rp.104,915,168,936.00**

C. 7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp17,807,401,064.00** dan **Rp.0.00**.

Transaksi/Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya terdapat pada mutasi tambah yaitu transfer masuk dari satker likuidasi sesuai dengan BAST No. 11826/A.A2/KU.03.02/2025 sebesar **Rp17,807,401,064.00**.

C. 8. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp158,915,965.00** dan **Rp.0.00**. Transaksi/Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya terdapat pada mutasi tambah yaitu transfer masuk dari satker likuidasi sesuai dengan BAST No. 11826/A.A2/KU.03.02/2025 sebesar **Rp158,915,965.00**.

Adapun rincian aset tetap lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025

No.	Aset Tetap Lainnya	Jumlah	
		Unit	Rp.
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	789	123,008,960
2	Kartografi Naskah dan Lukisan	4	732,000
3	Barang bercorak kesenian	121	34,680,005
4	Alat bercorak kebudayaan	1	495,000
Jumlah		915	158,915,965.00

C.10. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing (Rp.117,122,722,529.00) dan (Rp.0.00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	85.197.428.743	(64.676.579.500)	149.874.008.243
2	Gedung dan Bangunan	104.915.168.936	(35.759.922.867)	140.675.091.803
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.807.401.064	(16.686.220.162)	34.493.621.226
4	Aset Tetap Lainnya	158.915.965	-	158.915.965

C.11 ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain merupakan asset yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.161,215,000.00 dan Rp.0.00.

Adapun aset yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Rincian Peralatan dan Mesin yang dihentikan dari Penggunaan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	161.215.000	(161.215.000)	-

Terhadap Aset lain-lain ini belum dilakukan penghapusan karena masih proses inventarisasi Aset Aset Lainnya untuk bisa dilakukan penghapusan sekaligus mengingat jumlah aset yang akan dihapuskan masih ada demi efisiensi waktu.

C.12 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing **(Rp.161,215,000.00)** dan **(Rp.0.00)**. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 25

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Aset Tetap per 30 Juni 2025

No	Aset Lain-Lain	Jumlah	
		Unit	(Rp)
1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	161.215.000

C.13 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing **Rp.1,022,457,163.00** dan **Rp.0.00**. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 ini merupakan Belanja Pegawai (Gaji Induk Bulan Juli 2025 dan Tunjangan Kinerja Susulan Bulan Juni 2025) dan Belanja Barang (Pembayaran Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Honor PPNN bulan Juni 2025) yang masih harus dibayar. Hal ini terjadi karena SPM sudah terbit pada bulan Juni 2025 tapi SPP2D terbit pada Bulan Juli 2025.

Tabel 26

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025

No	Uraian	Saldo per 30 Juni 2025 (Rp)	Penyetoran Setelah Tanggal Neraca (Rp)	Saldo Setelah Tanggal Neraca (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga (Gaji Induk Bulan Juli	792.119.079	792.119.079	-
2	Utang Kepada Pihak Ketiga (Tunjangan Kinerja Susulan Bulan Juni 2025)	21.958.084	21.958.084	-
3	Utang Kepada Pihak Ketiga (Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	145.880.000	145.880.000	-
4	Utang Kepada Pihak Ketiga (Honor PPNN bulan Juni 2025)	62.500.000	62.500.000	-
Jumlah		1.022.457.163	1.022.457.163	-

Adanya saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 disebabkan SPM atas belanja tersebut terbit di bulan Juni 2025 sedangkan SP2D terbit di bulan Juli 2025. (Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Juli 2025, Tunjangan Kinerja susulan Bulan Juni 2025, Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Honor PPNPN Bulan Juni 2025).

C.14 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo Pendapatan diterima di muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing **Rp.19,684,884.00** dan **Rp.0.00** Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Pendapatan ini merupakan pendapatan sewa ATM BNI untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai Bulan 7 Agustus 2023 Sampai dengan 6 Agustus 2026 dengan nilai perjanjian sebesar **Rp.54,512,000.00**

Tabel 27

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025

No	Tanggal Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2024	Porsi Pendapatan Tahun 2024	Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 30 Juni 2025	Keterangan
1	7 Agustus 2023	54.512.000,00	3 tahun (7 Agustus 2023 s.d. 6 Agustus 2026)	28.770.217,00	9.085.333,00	19.684.884,00	Sewa ATM BNI

C.15 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing **Rp.300,000,000.00** dan **Rp0.00** . Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.16 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.84,571,898.00** dan sebesar **Rp0.00**. Utang Jangka Pendek lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yaitu Utang Pajak atas Uang Persediaan yang belum disetorkan per 30 Juni 2025.

C.17 EKUITAS

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing **Rp.382,280,413,932.00** dan **Rp.0.00**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada Semester I Tahun Anggaran 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki Pendapatan Operasional sebesar **Rp.183,642,333.00** yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, jumlah Beban Operasional Sebesar **Rp.32,260,765,624.00** sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar **(Rp.32,077,123,292.00)**. Dari Kegiatan Non Operasional terdapat surplus sebesar **Rp.0.00**. Dengan demikian Laporan Operasional defisit sebesar **(Rp.32,077,123,291.00)**. Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Tabel 28
Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Operasional					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak		183.642.333	-	183.642.333	100,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		183.642.333	-	183.642.333	100,00
Jumlah Pendapatan Operasional		183.642.333	-	183.642.333	100,00
Beban Operasional					
Beban Pegawai	D.2	14.173.947.037	-	14.173.947.037	100,00
Beban Persediaan	D.3	-	-	-	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.414.479.347	-	4.414.479.347	100,00
Beban Pemeliharaan	D.5	3.684.674.215	-	3.684.674.215	100,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.675.326.000	-	4.675.326.000	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	5.312.339.025	-	5.312.339.025	100,00
Jumlah Beban Operasional		32.260.765.624	-	32.260.765.624	100,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	0,00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	0,00
Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	0,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00
POS LUAR BIASA	D.9				
Beban Luar Biasa		-	-	-	0,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		-	-	-	0,00
Surplus/Defisit - LO		(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00

Laporan Operasional BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengalami defisit untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **(Rp.32,077,123,291.00)** dan **(Rp.0.00)**.

D. 1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar **Rp.174,557,000.00** dan **Rp.0.00**. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Operasional yang terdiri dari :

Tabel 29
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Akun	Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	174.557.000	-	174.557.000	100,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	174.557.000	-	174.557.000	100,00
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	-	-	0.00
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-	-	0.00
4259	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	0.00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0.00
	Jumlah	174.557.000	0	174.557.000	100,00

Pendapatan dari Pengelolaan BMN di atas merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMN (Gedung dan Bangunan) ke pihak ketiga. Berbeda dengan Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Laporan Realisasi Anggaran, pada Laporan Operasional tidak memperhitungkan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512X) karena dikategorikan dalam Pendapatan Non Operasional.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan merupakan pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) atas Rekening Pemerintah yang dimiliki oleh Satker. Pendapatan Denda merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah. Sedangkan Pendapatan Lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian Persekot/Uang Muka Gaji Tahun Anggaran yang Lalu.

Perbedaan pencatatan untuk nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) disebabkan karena perbedaan kebijakan akuntansi. Pada Pendapatan (LRA), pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN), sedangkan pada Pendapatan (LO), pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Mapping realisasi pendapatan yang dapat diklasifikasikan kedalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 30
Mapping Realisasi Pendapatan Pada Laporan Operasional

No	Kode Akun	Nama Akun	Pendapatan LRA	Pendapatan LO			Selisih	Keterangan
				Pendapatan Operasional	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Pendapatan Non Operasional		
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	174.557.000	174.557.000	-	-	-	
3	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan atau Pelatihan	-	-	-	-	-	
4	425912	Penerimaan kembali Belanja TAYL	-	-	-	-	-	
		Jumlah	174.557.000	174.557.000	-	-	-	

Tidak terdapat perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

D. 2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp14,173,947,037.00 dan Rp.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Akun	Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.029.325.717	-	8.029.325.717	100,00
511111	Beban Gaji Pokok PNS	5.880.717.500	-	5.880.717.500	100,00
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	72.396	-	72.396	100,00
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	441.854.360	-	441.854.360	100,00
511122	Beban Tunj. Anak PNS	125.001.492	-	125.001.492	100,00
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20.970.000	-	20.970.000	100,00
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	554.715.000	-	554.715.000	100,00
511125	Beban Tunj. PPh PNS	111.148.319	-	111.148.319	100,00
511126	Beban Tunj. Beras PNS	285.334.800	-	285.334.800	100,00
511129	Beban Uang Makan PNS	452.521.900	-	452.521.900	100,00
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	156.989.950	-	156.989.950	100,00
5116	Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	198.474.088	-	198.474.088	100,00
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	139.136.996	-	139.136.996	100,00
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.362	-	2.362	100,00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.458.061	-	8.458.061	100,00
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2.283.321	-	2.283.321	100,00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	27.156.998	-	27.156.998	100,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7.302.350	-	7.302.350	100,00
511628	Beban Uang Makan PPPK	14.134.000	-	14.134.000	100,00
5122	Beban Lembur	34.182.000	-	34.182.000	100,00
512211	Beban Uang Lembur	34.182.000	-	34.182.000	100,00
5124	Beban Tunj. Khusus & Beban Pe	5.911.965.232	-	-	100,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.760.209.946	0	-	100,00
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	151.755.286	-	-	100,00
Realisasi Belanja Bruto		14.173.947.037	0	14.173.947.037	100,00

Perbedaan realisasi antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 32
Perbedaan Realisasi Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO per 30 Juni 2025

Akun	Uraian	LRA (Belanja)	LO (Beban)	Selisih
5111	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.188.167.997	8.029.325.717	-841.157.720
511111	Beban Gaji Pokok PNS	5.258.932.000	5.880.717.500	(621.785.500)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	65.247	72.396	(7.149)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	395.564.450	441.854.360	(46.289.910)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	111.693.494	125.001.492	(13.307.998)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	19.990.000	20.970.000	(980.000)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	493.802.000	554.715.000	(60.913.000)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	108.613.566	111.148.319	(2.534.753)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	255.063.240	285.334.800	(30.271.560)
511129	Beban Uang Makan PNS	403.164.000	452.521.900	(49.357.900)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	141.280.000	156.989.950	(15.709.950)
5116	Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	176.516.004	198.474.088	(21.958.084)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	122.571.296	139.136.996	(16.565.700)
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.094	2.362	(268)
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.455.761	8.458.061	(1.002.300)
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2.010.545	2.283.321	(272.776)
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	23.908.998	27.156.998	(3.248.000)
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.433.310	7.302.350	(869.040)
511628	Beban Uang Makan PPPK	14.134.000	14.134.000	-
5122	Beban Lembur	34.182.000	34.182.000	-
512211	Beban Uang Lembur	34.182.000	34.182.000	-
5124	Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	5.900.930.657	5.911.965.232	(11.034.575)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.749.175.371	5.760.209.946	(11.034.575)
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	151.755.286	151.755.286	-
Realisasi Beban Bruto		13.299.796.658	14.173.947.037	(874.150.379)
Pengembalian Beban Gaji Pokok		319.259	-	319.259
Realisasi Beban Netto		13.299.477.399	14.173.947.037	(874.469.638)

Selisih antara realisasi belanja dan beban tersebut dapat dijelaskan pada tabel mutasi sebagai berikut :

Tabel 33
Mutasi Belanja – Beban Pegawai per 30 Juni 2025

Belanja Pegawai - LRA 30 Juni 2025	13.299.796.658
Mutasi tambah:	874.150.379
Gaji Bulan Juli 2025	813.757.904
Jurnal Balik Kelebihan Bayar Uang Makan pegawai Desember tahun 2024	49.357.900
Jurnal Balik Kelebihan Bayar Tukin pegawai Desember tahun 2024	11.034.575
Mutasi kurang:	0
.....	-
Beban Pegawai - LO 30 Juni 2024	14.173.947.037

Berdasarkan tabel mutasi di atas dijelaskan bahwa selisih LO – LRA dikarenakan mutasi tambah akrual yaitu Gaji Bulan Juli 2025 sebesar Rp813,757,904.00 karena sampai dengan tanggal pelaporan belum terbit SP2Dnya sehingga secara akrual membentuk akun belanja pegawai yang masih harus dibayar. Selisih LO – LRA juga disebabkan jurnal balik atas kelebihan bayar Uang Makan Bulan Desember 2024

sebesar Rp49,357,900.00 dan jurnal balik atas kelebihan bayar Tunjangan Kinerja Bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp11,034,575.00. Hal ini disebabkan Uang Makan dan Tunjangan Kinerja bulan Desember tahun 2024 dimintakan secara penuh karena rekapitulasi kehadiran belum diperoleh. Untuk itu dilakukan jurnal balik karena hal ini menjadi beban pegawai pada tahun berjalan dan kelebihan bayar ini dipotong langsung dari Uang Makan dan Tunjangan Kinerja bulan Januari 2025.

D. 3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan Beban Persediaan Suku Cadang tidak dimasukkan dalam kategori Beban Persediaan namun dikategorikan dalam Beban Pemeliharaan.

D. 4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4,414,479,347.00 dan Rp0.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Beban Keperluan Kantor	1.262.584.175	-	1.262.584.175	100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	55.089.000	-	55.089.000	100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160.730.000	-	160.730.000	100,00
Beban Bahan	816.977.000	-	816.977.000	100,00
Beban Honor Output Kegiatan	40.150.000	-	40.150.000	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	249.000.000	-	249.000.000	100,00
Beban Langganan Listrik	900.576.372	-	900.576.372	100,00
Beban Sewa	111.372.800	-	111.372.800	100,00
Beban Jasa Profesi	324.500.000	-	324.500.000	100,00
Beban Jasa Lainnya	493.500.000	-	493.500.000	100,00
Jumlah Beban Jasa	4.414.479.347	0	4.414.479.347	100,00

Perbedaan pencatatan untuk nilai Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO periode Semester I 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 35
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO

Akun	Uraian Jenis Beban	LRA (belanja)	LO (beban)	Selisih	Keterangan
521111	Beban Keperluan Kantor	1.200.084.175	1.262.584.175	(62.500.000)	Gaji PPNPN Bulan Juni 2024
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	55.089.000	55.089.000	-	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160.730.000	160.730.000	-	
521211	Beban Bahan	816.977.000	816.977.000	-	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	40.150.000	40.150.000	-	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	249.000.000	249.000.000	-	
522111	Beban Langganan Listrik	1.127.392.912	900.576.372	226.816.540	Jurnal balik belanja listrik bulan Desember 2024
522119	Beban Sewa	111.372.800	111.372.800	-	
522151	Beban Jasa Profesi	324.500.000	324.500.000	-	
522191	Beban Jasa Lainnya	493.500.000	493.500.000	-	
	JUMLAH	4.578.795.887	4.414.479.347	164.316.540	

Perbedaan nilai antara Belanja Barang & Jasa di LRA dan Beban Barang & Jasa di LO dapat dilihat dari Mutasi Belanja - Beban Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 36
Mutasi Belanja - Beban Barang dan Jasa

Belanja Barang Jasa (LRA) 30 Juni 2025	4.578.795.887
Mutasi tambah :	62.500.000
Beban Barang yang masih harus dibayar	62.500.000
Tagihan Listrik Juni 2025 yang belum dibayar	0
Tagihan Telepon Juni 2025 yang belum dibayar	0
Belanja modal yang menjadi Aset Ekstrakomtabel	0
Mutasi kurang :	226.816.540
Barang Persediaan Konsumsi	-
Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	-
Pembayaran Langganan Listrik Des. 2024	226.816.540
Pembayaran Langganan Telepon Des. 2024	0
Pembayaran Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Des. 2024	0
Beban Barang Jasa (LO) 30 Juni 2025	4.414.479.347

Berdasarkan tabel mutasi di atas dijelaskan bahwa selisih LO – LRA dikarenakan adanya mutasi tambah akrual yaitu Belanja Barang yang masih harus dibayar (Gaji PPNPN Bulan Juni 2025 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum terbit SP2Dnya sehingga secara akrual membentuk akun belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp65,439,074.00

Sedang Mutasi kurang akrual yaitu :

- jurnal akrual atas pembayaran Langganan Listrik Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2025 sebesar Rp226,816,540.00.

D. 5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3,684,674,215.00 dan Rp0.00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 37

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.451.702.765	0	3.451.702.765	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232.971.450	0	232.971.450	100,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	3.684.674.215	0	3.684.674.215	100,00

Realisasi Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3,684,674,215.00 atau 100.00 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024, karena satker baru mempunyai DIPA di tahun 2025. Perbedaan pencatatan untuk nilai Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO periode Semester I Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 38

Perbandingan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO

Akun	Uraian Jenis Beban	LRA (belanja)	LO (beban)	Selisih
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.305.822.765	3.451.702.765	- 145.880.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232.971.450	232.971.450	-
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
593114	Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
	JUMLAH	3.538.794.215	3.684.674.215	(145.880.000)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa terdapat selisih LO – LRA atas LRA Belanja Pemeliharaan dan LO Beban Pemeliharaan sebesar Rp145,880,000.00 yaitu pekerjaan pemeliharaan yang SPMnya terbit di Bulan Juni 2024 tetapi SP2Dnya baru terbit di Bulan Juli 2025.

D. 6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4,675,326,000.00 dan Rp0.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Beban Perjalanan per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	754.270.000	-	754.270.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.921.056.000	-	3.921.056.000	100,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	4.675.326.000	0	4.675.326.000	100,00

Realisasi Beban Perjalanan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4,675,326,000.00 atau 100.00 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan per 30 Juni 2024, karena satker baru memiliki DIPA Tahun 2025.

Perbedaan pencatatan untuk nilai Belanja Perjalanan di LRA dan Beban Perjalanan di LO periode Semester I Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 40
Perbandingan Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan LO

Akun	Uraian Jenis Beban	LRA (belanja)	LO (beban)	Selisih
524111	Beban Perjalanan Biasa	754.270.000	754.270.000	-
524112	Beban Perjalanan Tetap	-	-	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.921.056.000	3.921.056.000	-
	JUMLAH	4.675.326.000	4.675.326.000	-

Berdasarkan tabel di atas tidak terdapat selisih LO – LRA atas LRA Perjalanan dan LO Perjalanan.

D. 7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5,312,339,025.00 dan Rp0.00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 41
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.224.173.276	0	3.224.173.276	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.911.083.032	0	1.911.083.032	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.082.717	0	177.082.717	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	-	0.00
Jumlah Penyusutan	5.312.339.025	0	5.312.339.025	100,00
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.312.339.025	0	5.312.339.025	100,00

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 meningkat sebesar Rp5,312,339,025.00 atau 100,00 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024, karena satker baru mempunyai DIPA pada Tahun 2025.

D. 8. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.0.00** dan **Rp.0.00**.

D. 9. POS LUAR BIASA

Jumlah Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0.00** dan **Rp0.00**. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas awal per 1 Januari 2025 sebesar **Rp.0.00** mengalami kenaikan ekuitas sebesar **Rp382,280,413,932.00** sehingga jumlah ekuitas akhir per 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp382,280,413,932.00**

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 42
Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	
				Nilai	%
Ekuitas Awal	E.1	-	-	-	0.00
Surplus/Defisit - LO	E.2	(32.077.123.291)	-	(32.077.123.291)	100,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	-	-	-	-
Penyesuaian Nilai Aset					
Koreksi Nilai Persediaan					
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	-	-	-	-
Lain-Lain	E.3.4	-	-	-	-
Transaksi Antar Entitas	E.4	414.357.537.223	-	414.357.537.223	100,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		382.280.413.932	-	382.280.413.932	100,00
Ekuitas Akhir	E.5	382.280.413.932	-	382.280.413.932	100,00

E. 1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.0.00** dan **Rp.0.00**.

E. 2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **(Rp.32,077,123,291.00)** dan **(Rp.0.00)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E. 3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0.00** dan **Rp0.00**.

E. 4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.414,357,537,223.00** dan **Rp.0.00**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Tabel 43
Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai 30 Juni 2025	Nilai 30 Juni 2024	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Diterima dari Entitas Lain	174.557.000	-	174.557.000	100,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.092.393.501	-	26.092.393.501	100,00
Transfer Masuk	388.439.700.722	-	388.439.700.722	100,00
Transfer Keluar	-	-	-	0.00
Jumlah	414.357.537.223	0	414.357.537.223	100,00

E. 4. 1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar **Rp174,557,000.00** sedangkan DKEL sebesar **Rp26,092,393,501.00**

E. 5. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.382,280,413,932.00** dan **Rp.0.00**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. 1. REKENING PEMERINTAH

Sampai dengan 30 Juni 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki 2 (dua) buah rekening yaitu :

1. Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran dengan nomor 9892416934541000 dengan nama BPG 088 BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA dan memiliki saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00. Rekening tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dengan Surat Persetujuan Nomor: S-434/KPN.1203/2025 tanggal 10 Pebruari 2025 (terlampir Surat Persetujuan dan Saldo Rekening Per 30 Juni 2025).
2. Rekening Bendahara Penerimaan dengan nomor 1932118858 dengan nama BPN 088 BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA dan memiliki saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp.0,00. Rekening tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dengan surat Persetujuan Nomor : 000726 tanggal 20 Mei 2025.

F. 2. PENYELESAIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

1. Utang kepada pihak ketiga berupa Belanja Pegawai (Gaji Induk bulan Juli 2024) sebesar Rp874,023,119.00 telah lunas dibayarkan sesuai dengan SPM No. 00162A tgl. 11 Juni 2024 (SP2D No. 240881504001137, tgl. 1 Juli 2024)
2. Utang kepada pihak ketiga berupa Belanja Barang (Gaji PPNPN bulan Juni 2024 sebesar Rp65,439,074.00 telah lunas dibayarkan sesuai dengan SPM No. 00201A tgl. 24 Juni 2024 (SP2D No. 240881504101147, tgl. 1 Juli 2024)
3. Utang kepada pihak ketiga atas kontrak pekerjaan Fullboard Meeting Package kegiatan Upreskilling sebesar Rp388.870.001,00 telah lunas dibayarkan secara tunai kepada pihak yang bersangkutan.
4. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19,178,111.00 telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. Rincian Setoran Ke Kas Negara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

F. 3. STRUKTUR PEJABAT PERBENDAHARAAN

Per 30 Juni 2025 Struktur Perbendaharaan pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 12580/MDM.A/KU.00.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 Pejabat Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

Tabel 44

Struktur Pejabat Perbendaharaan

Jabatan Perbendaharaan	Nama Pejabat Perbendaharaan
Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Nana Halim S.E., MM
Bendahara Penerimaan	Nirmahayu, S.Pd
Bendahara Pengeluaran	Erpin Juniati Nababan, S.Pd

Untuk Pejabat Penandatanganan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menerbitkan Surat Keputusan nomor : 1299/D7.3/KP.13/2024, tanggal 13 Mei 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 45**Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan**

Jabatan Perbendaharaan	Nama Pejabat Perbendaharaan
Pejabat Pembuat Komitmen	Wawan Saepul Irwan, S.Pd., M.Si
Pejabat Penandatangan SPM	Lugina Aulya Zaman
PPABP	Lili Husada, SST.Par, M.M